THE 10th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Sufyan Baihaqi
Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun
Sufyanbaihaqiqi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Madiun selama 2012-2016 dengan rasio keuangan yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan. Jenis penelitian menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang dilakukan berupa data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas sangat efektif dengan rerata 107% tetapi terus mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 sedangkan rasio efisiensi sudah cukup efisien dengan rerata 23,36%. Pada rasio keserasian pemerintah daerah Kabupaten Madiun masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 80,29% daripada untuk belanja pembangunan (Modal) 19,74%. Rasio pertumbuhan menujukkan trend cenderung positif dimulai dari pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata 24,95%, pertumbuhan pendapatan rata-ratanya 13,89. Pada pertumbuhan belanja operasi cenderung lebih negatif dengan rata-rata 13,47 daripada pertumbuhan belanja modal yang rata-ratanya 24,93%.

Kata Kunci: Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian , Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan.

I. Pendahuluan

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut terhadap barang-barang publik dan jasa pelayanan (Rahman, Naukoko dan Londah, 2014 :59).

Desentralisasi pemerintah daerah telah melahirkan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik di daerahnya masing-masing (Mahsun, 2006:101). Pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang menjalankan setiap penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat harus menyampaikan laporan kinerja keuangan daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya (Hanik dan Karyanti, 2014)

Kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari sektor publik merupakan hal yang wajar menjadi fokus perhatian dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Kinerja tersebut dinilai baik jika mampu melaksanakan tujuan yang telah disepakati bersama. Kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program-program kerja. Pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dapat digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik (Kalalo, Tinangon & Elim, 2014: 607).

Penilaian kinerja atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menjadi bagian dari pengendalian, karena penilaian kinerja dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas dan efisiensi yang didalam mencapai tujuan organisasi (Pratolo dan Jatmiko, 2017:17). Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjalakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. (Nurdiawaty dan Zaman 2016:33).

Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.(Erlina, Rambe & Rasdianto, 2015: 19-20).

Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 Tahun 2013 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Kedua dasar tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya, sehingga lebih efektif dan efisien dalam kinerja serta pelaporannya.

Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) dan hasil analisis rasio

keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Halim, 2012: L-4). Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah (Yanti, 2013: 445).

Beberapa penelitian tedahulu yang berhasil membuktikan bahwa penilaian kinerja Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah terdapat dalam Penelitian Pramono (2014) yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakata dalam mengelola sumber dayanya. Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).

Penelitian Saputra, Suwendra, dan Yudiaatmaja (2016) yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20102014. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.

Penelitian lain dilakukan oleh Nurhayati (2015) yang bertujuan untuk mengetahui dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyajian

laporan keuangan dan kinerja pemerintah dalam mewujudkan pertanggunjawaban. Hasil dari Analisis Rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah untuk tahun anggaran 2009-2012 yang diukur melalui Rasio Kemandirian Daerah sangat rendah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi, Rasio Efektivitas tahun anggaran 2009-2012 sangat efektif sedangkan Rasio efisiensi tahun anggaran 2009-2012 sangat efisiens, Rasio Aktivitas tahun anggaran 2009-2012 yang menjelaskan bahwa hasil rasio belanja rutin lebih diprioritas dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2009-2012.

Berdasarkan hasil penelitian di atas membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami pasang surut, karena setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda. Terlihat bahwa tingkat kemandirian daerah, derajat desentralisasi, ketergantungan dinilai sangat rendah. Namun dilihat dari efektivitas dan efisiensi menunjukkan nilai yang cenderung lebih positif.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang penilaian kinerja keuangan, maka analisis rasio keuangan sebagat alat untuk mengetahui kinerja keuangan daerah. Seperti halnya di pemerintah Kabupaten Madiun dengan pengelolaan keuangan yang profesional serta mewujudkan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan menghasilkan layanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan paparan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun selama 2012-2016 dengan rasio keuangan yang terdiri dari efek efektivitas, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2014 : 13) adalah "metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi"*.
2. Teknik Pengumpulan Data
   a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini adalah wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersrtuktur secara sistematis dan spesifik untuk pengumpulan datanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 sampai 2016.

3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini mengacu pada pendapat Sugiyono (2016: 247-249). Dimana kegiatan utama saat analisis data adalah tahap analisis sebelum dilapangan dan tahap analisis dilapangan. Berikut gambar prosedur penelitian ini:

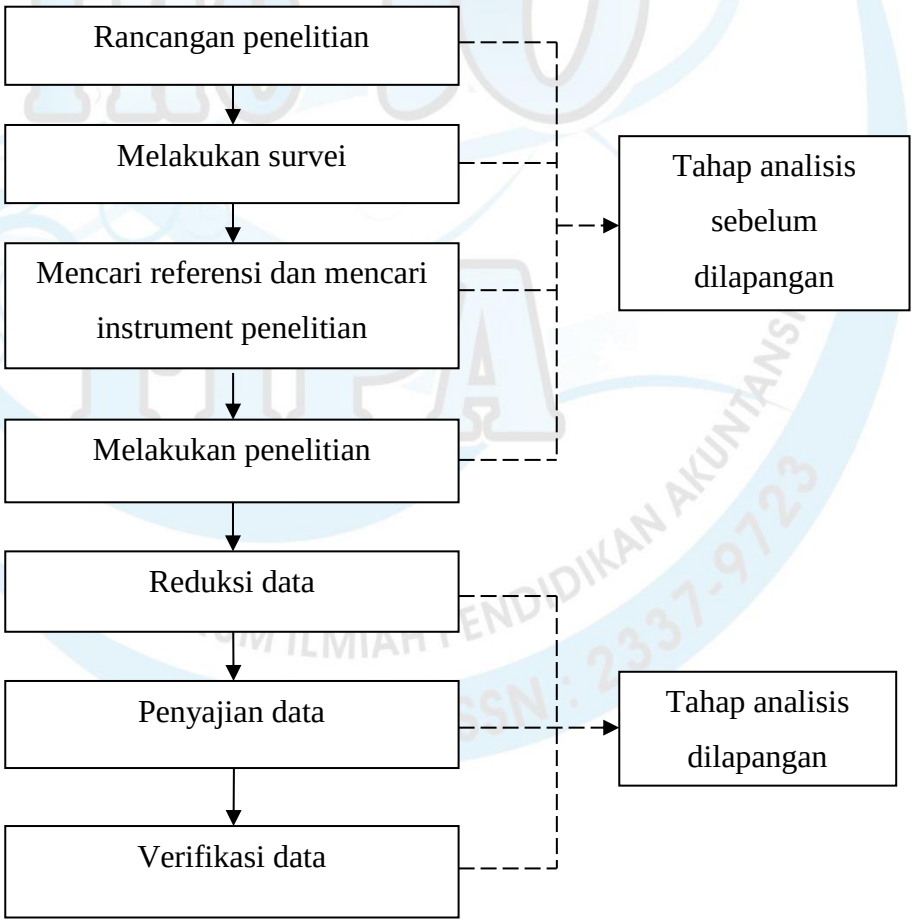

Gambar 1. Prosedur Penelitian

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis dalam penelitian ini terdiri empat tahapan analisis yang digunakan, antara lain seperti teori yang dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2012):

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang mampu dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

(Halim dan Kusufi :2012)

b. Rasio Efisiensi

Rasio efesiensi adalah rasio yang memberikan perbandingan antara besarnya biaya yang keluar untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{Biaya\ yang\ dikeluarkan\ untuk\ memungut\ PAD}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

(Halim dan Kusufi :2012)

c. Rasio Keserasian

Rasio ini mengambarkan situasi alokasi dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan yang digunakan. Secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Rasio Belanja Operasi $= \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$

(Fathah :2017)

2. Rasio Belanja Modal $= \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$

(Fathah :2017)

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

$$r = \frac{Pn - Po}{Po} \times 100\%$$

(Fathah :2017)

5. Hasil Penelitian

1. Rasio Efektivitas

Tabel 1. Penghitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Madiun Tahun 2012-2016

Tahun	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria
2012	63.772.840.834,28	68.545.790.750,58	107%	Sangat Efektif
2013	71.353.566.867,04	84.428.636.445,32	118%	Sangat Efektif
2014	110.103.221.345,00	121.390.771.373,60	110%	Sangat Efektif
2015	140.184.103.160,08	149.628.355.467,79	106%	Sangat Efektif
2016	170.633.969.524,00	163.635.265.620,91	95%	Cukup Efektif
Rata-rata			107%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupeten Madiun rata-rata selalu pasang surut dari tahun ke tahun akan tetapi masih tergolong sangat efektif. Dari perhitungan rasio efektivitas dapat diketahui bahwa efektivitas realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2012 yaitu sebesar 107%. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 118%, Peningkatan ini karena realisasi pendapatan asli daerah yang ditentukan melebihi target yaitu sebesar 12.075.069.578,28 hasil pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 turun menjadi 110% hal ini disebabkan karena target yang telah ditentukan terlalu tinggi dengan pendapatan asli daerah sebesar 11.287.550.028,60. Di tahun 2015 penurunan 4% menjadi 106% hal ini disebabkan oleh target yang terlalu tinggi ada dua(2) di pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah mengalami kerugian sehingga pendapatan asli daerah diperoleh sebesar 9.444.252.307,71 serta yang terakhir di tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 95%. Penurunan disebabkan target penerimaan yang tinggi sehingga mengalami kerugian sebesar 6.998.703.903,09. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Madiun untuk tahun 2012-2016 tergolong sangat efektif karena hasil menunjukkan di atas 100%.

2. Rasio Efisiensi

Tabel 4.7 Penghitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Madiun Tahun 2012-2016

Tahun	Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria
2012	15.943.210.209,00	68.545.790.750,80	23,25%	Cukup Efisien
2013	17.838.391.717,00	83.428.636.445,32	21,38%	Cukup Efisien
2014	27.525.805.336,00	121.390.771.373,60	22,67%	Cukup Efisien
2015	35.046.025.790,00	149.628.355.467,79	23,42%	Cukup Efisien
2016	42.658.492.381,00	163.635.265.620,91	26,06%	Cukup Efisien
Rata-rata			23,35%	Cukup Efisien

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupeten Madiun rata-rata selalu kurang lebih sama dari tahun ke tahun akan tetapi masih tergolong cukup efektif. Dari perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2012 biaya pemungutan pendapatan asli daerah sebesar 15.943.210.209,00. Prosentase yang dihasilkan 23,35% atau realisasi pendapatan asli daerah sebesar 68.545.790.750,80. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan biaya pemungutan pendapatan asli daerah sebesar 17.838.391.717,00 dengan prosentase 21,38% atau dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah 83.428.636.445,32 hal ini disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah yang tidak terlalu signifikan dengan realisasi pendapatan asli daerah yang didapatkan. Ditahun 2014 biaya pemungutan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 27.525.805.336,00 dengan prosentase 22,67% atau dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah sebesar 121.390.771.373,60 dengan biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan asli daerah mengalami pendapatan yang relatif sama. Di tahun 2015 biaya pemungutan pendapatan asli daerah meningkat kembali menjadi 35.046.025.790,00 dengan prosentase 23,42%. Realisasi pendapatan asli daerah yang didapatkan 149.628.355.467,79 dengan ini biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan asli daerah sudah mengalami

penurunan pendapatan karena pengelolaan pendapatan dari berbagai bidang belum maksimal dilakukan. Kemudian di tahun 2016 mengalami peningkatan kembali menjadi 42.658.492.381,00 dengan prosentase 26,06 atau dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah 163.635.265.620,91. biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan asli daerah sudah mengalami kerugian karena pemerintah daerah belum optimal dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi kinerja keuangan daerah Kabupaten Madiun untuk tahun 2012-2016 masih tergolong cukup efisien.

3. Rasio Keserasian

Rasio keserasian terdiri atas dua yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

Tabel 3. Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Madiun Tahun 2012-2016 (Belanja Operasi)

Tahun	Realisasi Total Belanja Operasi (dalam jutaan)	Total Belanja (dalam jutaan)	Rasio Belanja Operasi (%)
2012	836.832.698.937,79	1.026.628.229.931,79	81,51%
2013	954.465.513.917,38	1.140.996.797.668,38	83,65%
2014	1.073.712.745.005,91	1.313.906.804.803,31	81,71%
2015	1.248.882.908.745,92	1.581.057.648.336,72	78,99%
2016	1.386.805.042.929,96	1.834.089.868.119,89	75,61%
Rata-rata			80,29%

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 4. Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Madiun Tahun 2012-2016 (Belanja Modal)

Tahun	Realisasi Total Belanja Modal (dalam jutaan)	Total Belanja (dalam jutaan)	Rasio Belanja Operasi (%)
2012	188.551.509.844,00	1.026.628.229.931,79	18,36%
2013	185.514.724.351,00	1.140.996.797.668,38	16,25%
2014	239.470.373.397,40	1.313.906.804.803,31	18,22%
2015	327.742.397.090,80	1.581.057.648.336,72	20,72%
2016	460.886.347.869,00	1.834.089.868.119,89	25,12%
Rata-rata			19,47%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 dan 4 dapat diketahui bahwa Rasio Keserasian dibagi menjadi rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. rasio belanja operasi pemerintah Kabupaten Madiun dari tahun 2012-2016 menunjukkan penurunan. Dimulai dari tahun 2012 sebesar 81,51%. Kemudian di tahun 2013 naik menjadi 83,49%,dan pada tahun 2014 turun terus menerus menjadi 81,71%. Pada tahun 2015 turun menjadi 78,99% dan di tahun 2016 kembali turun menjadi 75,61. Penurunan terjadi pada tahun 2014, 2015 dan 2016 hal ini disebabkan oleh anggaran setelah perubahan dalam setiap tahunnya selalu bertambah sehingga proses alokasi dana belum maksimal. Penurunan rasio belanja operasi di Kabupaten Madiun sebenarnya tidak terlalu signifikan hanya sekitar 3% per tahun dalam hal ini pemerintah Kabupaten Madiun harus memperhatikan alokasi dana untuk belanja operasi. Rasio Belanja Modal di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan. Penurunan terjadi pada tahun 2013 saja. Sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 rasio belanja modal sebesar 18,36% turun menjadi 16,25% di tahun 2013. .Kemudian di tahun 2014 naik menjadi 18,22%.Di tahun 2015 naik kembali menjadi 20,72% dan tahun 2016 menjadi 25,12%. Rasio belanja modal di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan secara signifikan.

4. Rasio Pertumbuhan

Tabel 5. Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Madiun Tahun 2012-2016 (Belanja Modal)

Keterangan (dalam jutaan Rp)	Tahun					Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
PAD	68.545.790.834,28	83.428.636.445,32	121.390.771.373,60	149.628.355.467,79	163.635.265.620,91	
Pertumbuhan PAD		21,71%	45,50%	23,26%	9,36%	24,95%
Pendapatan	1.029.699.204.065,80	1.182.864.757.088,32	1.386.252.157.501,60	1.622.962.461.463,79	1.727.312.699.928	
Pertumbuhan Pendapatan		14,87%	17,19%	17,07%	6,42%	13,89%
Belanja Operasi	836.832.689.937,79	954.465.513.917,38	1.073.712.745.005,91	1.248.882.908.745,92	1.386.805.042.929,96	
Pertumbuhan B. Operasi		14,05%	12,49%	16,31%	11,04%	13,47%
Belanja Modal	188.551.509.844,00	185.514.724.351,00	239.470.373.397,40	327.742.397.090,80	443.808.272.889,93	
Pertumbuhan B. Modal		-1,61%	29,08%	36,86%	35,41%	24,93%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan pada pertumbuhan Realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 di Kabupaten Madiun pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun prosentase sebesar 21,71% pada tahun 2013. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi 45,50% Pada tahun 2014 terjadi penuruan secara prosentase menjadi 23,26% kemudian ditahun 2016 menjadi 9,36%.. Jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun yang selalu mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 dan maka dapat dikatakan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun kurang baik.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan akan tetapi dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan secara cenderung negatif. Hal ini dikarenakan anggaran yang terlalu tinggi menghasilkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan ditahun 2015 dan kerugian yang sangat signifikan terjadi ditahun 2016.

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan pendapatan dapat diketahui bahwa selalui terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 di Kabupaten Madiun. Pendapatan daerah Kabupaten Madiun secara prosentase sebesar 14,87 pada tahun 2013. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi 17,19%.. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan lagi menjadi 17,07% kemudian terjadi penurunan di tahun 2016 menjadi 6,42%.. Jika dilihat dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Madiun mengalami penurunan ditahun 2016.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami penurunan maka dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatan pemerintah Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan secara cenderung negatif. Hal ini dikarenakan anggaran yang terlalu tinggi sehingga pendapatan mengalami kerugian yang sangat signifikan terjadi ditahun 2015 dan 2016.

Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2013 tumbuh 14,05%dan tahun 2014

mengalami penurunan menjadi 12,49%. Tahun 2015 naik sebesar 16,31% Namun di tahun 2016 turun kembali sebesar 11,04%. sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,47%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal mengalami kenaikan. Di tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar -1,61%. Kemudian di tahun 2014 naik menjadi 29,08%Tahun 2015 pertumbuhan rasio belanja modal naik kembali menjadi 36,86% dan di tahun 2016 turun sedikit menjadi 35,41%Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 24,93%.

III. PEMBAHASAN

1. Rasio Efektivitas

   Rasio efektivitas efektivitas kinerja keuangan Kabupaten madiun sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 107%. Hal ini disebabkan karena penerimaan melebihi dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dianggarkan sebelumnya. ketika mengalami penurunan yang dialami pada periode 2015 yaitu prosentasenya sebesar 106% dan pada 2016 yaitu realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penurunan yang dialami tidak terlalu signifikan. Efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun juga dapat dikatakan baik karena dalam hal merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah direncanakan. Pemerintah Kabupaten Madiun harus terus mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatannya yang sudah telah ada. Pemerintah Daerah diharapkan tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD) di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) sektor potensial.

2. Rasio Efisiensi

   Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan rata-rata selalu kurang lebih sama dari tahun ke tahun akan tetapi masih tergolong cukup efektif. Efisiensi kinerja keuangan daerah Kabupaten Madiun untuk tahun 2012-2016 tergolong cukup efisien. Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui

bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Madiun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 23,36 atau dapat dikatakan cukup efisien karena belum di bawah 10%. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan efisiensi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini masih kurang baik karena belum dapat menekan jumlah biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk ke depannya diharapkan pemerintah Kabupaten Madiun dapat meminimalisir jumlah biaya yang dikeluarkan Pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga ke depannya dapat terjadi peningkatan efisiensi keuangan daerah.

3. Rasio Keserasian

Berdasarkan tabel 3 dan 4 diatas dapat diketahui bahwa rasio keserasian bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Dilihat dari rata-rata rasio keserasian Kabupaten Madiun untuk belanja operasi (belanja rutin), sedangkan rasio belanja modal (belanja pembangunanDengan demikian, Rasio Belanja Operasi masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan khususnya belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah Kabupaten Madiun lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkosentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintahan Kabupaten Madiun kecil atau belum terpenuhi.Untuk itu, ke depannya Pemerintah Kabupaten Madiun diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

4. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui hasil dari perhitungan pada pertumbuhan realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2012

sampai tahun 2016 di Kabupaten Madiun Pada tahun 2012 pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun sebesar 68.545.790.834,28 naik menjadi 83.428.636.445,32 pada tahun 2013. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi 121.390.771.373,60 . Pada tahun 2014 terjadi kenaikan lagi menjadi 149.628.355.467,79 kemudian ditahun 2016 menjadi 163.635.265.620,91. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2016 sebesar 9,36% dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan target pendapatan asli daerah dilihat dari 170.633.969.524,00 yang digunakan realisasinya 163.635.265.620,91. Jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun yang selalu mengalami penurunan maka dapat dikatakan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun kurang baik pada tahun tertentu.

Upaya pemerintah Kabupaten Madiun untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerahnya bisa dikatakan cukup berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya pemerintah Kabupaten Madiun selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu perkembangan pertumbuhan pendapatan dapat diketahui bahwa selalui terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2012 pendapatan daerah Kabupaten Madiun sebesar 1.029.699.204.065,80 naik menjadi 1.182.864.757.088,32 pada tahun 2013. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi 1.386.252.157.501,60. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan lagi menjadi 1.622.962.461.463,79 kemudian di tahun 2016 menjadi 1.727.312.699.928. Jika dilihat dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan pasang surut. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,42% dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan target pendapatan daerah dilihat dari 1.747.634.948.635,00 yang digunakan realisasinya 1.727.312.699.928,91. Jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun yang selalu mengalami penurunan maka dapat

dikatakan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun kurang baik pada tahun tertentu.

Pertumbuhan Belanja Operasi menunjukkan hasil yang cenderung naik setiap tahunnya. Tahun 2012 belanja operasi pemerintah Kabupaten Madiun 836.832.689.937,79 naik menjadi 954.465.513.917,38 atau prosentasenya 14,05% pada tahun 2013 dan ditahun 2014 naik menjadi 1.073.712.745.005 atau 12,49%. Pada Tahun 2015 naik kembali menjadi 1.248.882.908.745,92 atau prosentasenya sebesar 16,31%. Namun di tahun 2016 menjadi 1.386.805.042.929,96 atau turun prosentasenya sebesar 11,04%. Jadi pertumbuhan rasio belanja operasi rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,47%.

Pertumbuhan belanja modal mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di tahun 2012 belanja modal pemerintah Kabupaten Madiun yaitu 188.551.509.844,00. Pada tahun 2013 mengalami turun menjadi 185.514.724.351,00 atau prosentasenya sebesar -1,61%. Kemudian di tahun 2014 naik menjadi 239.470.373.397,40 atau prosentasenya tumbuh 29,08%. Tahun 2015 pertumbuhan rasio belanja modal naik kembali menjadi 327.742.397.090,80 atau prosentasenya tumbuh 36,86% dan di tahun 2016 turun menjadi 443.808.272.889,93 atau tumbuh 35,41%. Jadi pertumbuhan rasio belanja modal rata-rata pertumbuhannya sebesar 24,93%.

Pada rasio pertumbuhan belanja operasi dan modal dalam mempertahankan hasil disetiap periode dapat dikatakan baik. Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal terutama pertumbuhan Rasio Belanja Modal yang selalu mengalami kenaikan meskipun pada kenyataannya proporsi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi Belanja Operasinya untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk tahun 2012 sampai 2016 Dilihat dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dikategorikan sangat efektif dan dalam keadaan yang bagus dalam mengelola keuangannya.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk tahun 2012 sampai 2016 Dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah dikategorikan cukup efisien dalam kondisi yang cukup baik dalam merealisasikan penerimaannya.
3. Rasio keserasian menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Madiun dilihat dari masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan khususnya belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah Kabupaten Madiun lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.
4. Rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang sangat baik karena tiap-tiap tahun rata-rata yang diperoleh untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) 24,95%, pertumbuhan pendapatan 13,89%, pertumbuhan belanja operasi 13,47 dan pertumbuhan belanja modal 24,93%.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun
   a) Pemerintah Kabupaten Madiun harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk menggunakan secara maksimal potensi pendapatan yang dimiliki melalui sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah, maka perlu tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial.
   b) Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun lebih efisien dalam hal belanja yaitu menekankan pada belanja modal yang lebih banyak, karena belanja modal itu sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat baik sarana dan prasarana Pemerintah Daerah

Kabupaten Madiun daripada menambah pada belanja operasi yang masih tinggi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   a) Pada penelitian ini terbatas untuk tahun 2012-2016. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun.
   b) Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun.
   c) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rasio-rasio analisis agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bangun Wilson. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.

Darodjat, Tubagus Achmad. (2015). Konsep-konsep Dasar Manajemen Personalia Masa Kini. Bandung: PT Refika Aditama.

Erlina, Rambe .S.O, & Rasdianto (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta: Salemba Empat.

Fahmi, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Fathah N.R.(2017) Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK Vol 8. No 1. Hal 33-48. Juni 2017 (http://ejournal.unp.ac.id/emba/article/view/3418.pdf vol 8. no 1. diunduh tanggal 6 November 2017)

Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*:*Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. L1-L7

Halim, A. & Kusufi, M.S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi :Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Kedua . Jakarta: Salemba Empat.

Hanafi, M.M. & Halim, A.(2016). *Analisis Laporan Keuangan.* Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hanik, U. F., Karyanti, D.T. (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *JABPI*, 2, (22), 143-156. (http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/jabpi/article/view/600, diunduh 28 Maret 2017)

Harahap, S.S. (2016). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Jumingan (2014). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta:PT Bumi Aksara.

Kalalo, P.N., Tinangon, J.J., dan Elim, I (2014). Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1, (2), 606-616, Maret 2014. (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4375, diunduh 27 Maret 2017)

Kasmir (2016). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Edisi Pertama. Yogjakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Mahmudi (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Edisi Kedua Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Moeleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mursyidi (2009). Akuntansi Pemerintahaan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama

Nordiawan, D. & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat.

Nurdiwaty, D., & Zaman, B (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri. *Ekonomika-Bisnis*, 1, (7), 31-40. https://www.researchgate.net/publication/320230199, diunduh 28 Maret 2017)

Pramono, J (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti* , 13, (7), 83-112. (http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/97, diunduh pada 28 Maret 2017)

Pratolo, S & Jatmiko, B. (2017). Akuntansi Manajemen Pemerintah daerah. Yogyakarta: LP3M (Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Prastowo, D. (2011). *Analisis Laporan Keuangan:Konsep & Aplikasi.* Yogyakarta: UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN.

Rahman, A.N., Naukoko, A. & Londah, A (2014). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 3, (14), 56-70.(https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5462/4969, diunduh 27 Maret 2017)

Saputra, C. S., Suwendra, W.I, & Yudiatmaja. F(2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*,(4).(http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/viewFile/6720/4581, diunduh 28 Maret 2017)

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tobi R.M (2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, 5 (8), 25-30 https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/2506/2245, *diunduh 29 desember.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Indonesia. 2014. Jakarta.

Yanti, N (2013). Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang. *Jurnal KBP*, 3, (1), 439-453. (https://akbpstie.ac.id/cmsz/medias/file/10.%20NOVI%20YANTI.pdf, diunduh 28 Maret)